

BAGIAN ANGGARAN 022



LAPORAN KEUANGAN KANTOR UPBU EWER KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2023

**JL. BISMAM EWER
DISTRIK AGATS KABUPATEN ASMAT
PAPUA**

KATA PENGANTAR

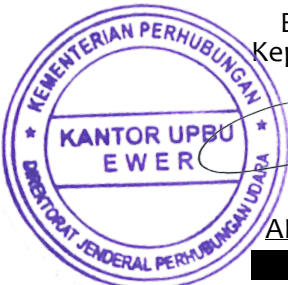
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ewer, 26 Januari 2024
Kepala Kantor UPBU Ewer




ARIEF SANTOSO, S.Sos

	Hal
Kata Pengantar	1
Pernyataan Tanggung Jawab	4
I. Ringkasan	5
II. Laporan Realisasi Anggaran	8
III. Neraca	9
IV. Laporan Operasional	10
V. Laporan Perubahan Ekuitas	11
VI. Catatan Atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
A.1. Dasar Hukum	12
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis	12
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	13
A.4. Kebijakan Akuntansi	13
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	21
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	21
B.2. Belanja Negara	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	25
C.1. Aset Lancar	25
C.2. Aset Tetap	26
C.3. Kewajiban Jangka Pendek	30
C.4. Ekuitas	32
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	33
D.1. Pendapatan Operasional	33
D.2. Beban Operasional	33
D.3. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	38
D.4. Surplus/Defisit Pos Luar Biasa	38
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	39
E.1. Surplus/Defisit Pos LO	39
E.2. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	40
E.3. Transaksi Entitas dan Ekuitas Akhir	40
F. Pengungkapan Penting Lainnya	42
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	42
F.2. Pengungkapan Lain-lain	42

Tabel 1	: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2023 dan 2022	5
Tabel 2	: Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2023 dan 2022	6
Tabel 3	: Penggolongan Kualitas Piutang	19
Tabel 4	: Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	20
Tabel 5	: Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	21
Tabel 6	: Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2023 dan 2022	21
Tabel 7	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2023	22
Tabel 8	: Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2023 dan 2022	23
Tabel 9	: Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2023 dan 2022	23
Tabel 10	: Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2023 dan 2022	24
Tabel 11	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2023 dan 2022	24
Tabel 12	: Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2023 dan 2022	25
Tabel 13	: Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	25
Tabel 14	: Rincian Persediaan	26
Tabel 15	: Rincian Aset Tetap	26
Tabel 16	: Rincian Saldo Tanah	27
Tabel 17	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	29
Tabel 18	: Rincian Kewajiban Jangka Pendek	30
Tabel 19	: Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga	31
Tabel 20	: Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan	31
Tabel 21	: Rincian Pendapatan Diterima di Muka	32
Tabel 22	: Rincian Ekuitas Dana Lancar	32
Tabel 23	: Rincian PNBP-LO	33
Tabel 24	: Rincian Beban Pegawai	33
Tabel 25	: Rincian Beban Persediaan	34
Tabel 26	: Rincian Beban Barang dan Jasa	34
Tabel 27	: Rincian Beban Pemeliharaan	35
Tabel 28	: Rincian Beban Perjalanan dinas	35
Tabel 29	: Rincian Beban Barang Untuk diserahkan kepada Masyarakat	36
Tabel 30	: Rincian Beban Bantuan Sosial	36
Tabel 31	: Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	37
Tabel 32	: Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	37
Tabel 33	: Rincian Beban Lain-lain	37
Tabel 34	: Rincian Surplus/Deficit dari Kegiatan Non Operasional	38
Tabel 35	: Rincian Pos Luar Biasa	38
Tabel 36	: Rincian Koreksi Nilai Persediaan	39
Tabel 37	: Rincian Koreksi Atas Beban	40
Tabel 38	: Rincian Koreksi Atas Pendapatan	41



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA EWER**

Jln. Bismam Ewer
Distrik Agats Kab. Asmat
Papua - 99711

Tlp. :
E-mail : bdr_ewer@yahoo.co.id
Web-site :

TGM :
TLX :
FAX :

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ewer, 26 Januari 2024

Kepala Kantor UPBU Ewer



ARIEF SANTOSO

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp.425.638.655,- adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.425.638.655,- atau mencapai 182 persen dari estimasi pendapatan LRA sebesar Rp.234.252.000,-

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 adalah sebesar Rp.76.759.573.987,- atau mencapai 100 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.76.811.304.000,-

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember Tahun 2023 dan per 31 Desember Tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember Tahun 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember Tahun 2023			31 Desember Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	% Real. Thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	234.252.000	425.638.655	182	403.694.280
Belanja Negara	76.811.304.000	76.759.573.987	100	13.589.484.449

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2023.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember Tahun 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp.186.944.367.933,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.10.265.890,- Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.182.651.299.024,- Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.NIHIL dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.4.282.803.019,-

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.4.282.803.019,- yang terdiri dari hanya Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.4.282.803.019 dan nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp.182.661.564.914,- Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	31-Dec-23	31-Dec-22	Kenaikan / Penurunan	
			Rp	%
ASET				
Aset Lancar	10.265.890	10.671.415	(405.525)	(3,80)
Aset Tetap	182.651.299.024	136.230.449.713	46.420.849.311	34,08
Piutang Jk Panjang	-	-	-	0,00
Aset Lainnya	4.282.803.019	-	4.282.803.019	0,00
Jumlah Aset	182.651.299.024	136.230.449.713	46.420.849.311	34,08
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jk Pendek	4.282.803.019	-	4.282.803.019	0,00
Jumlah Kewajiban	4.282.803.019	-	4.282.803.019	0,00
EKUITAS				
Ekuitas	182.661.564.914	136.241.121.128	46.420.443.786	34,07
Jumlah Ekuitas	182.661.564.914	136.241.121.128	46.420.443.786	34,07
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	186.944.367.933	136.241.121.128	50.703.246.805	37,22

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, suplus/defisit pos luar biasa, dan surplus/defisit LO.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.420.738.655,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.30.339.130.201,- sehingga terdapat Surplus/Defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp.(29.918.391.546), Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp.4.900.000, Surplus/Defisist Sebelum Pos Luar Biasa Rp.(29.913.491.546), sehingga Surplus/Defisit-LO sebesar Rp.(29.913.491.546).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal adalah sebesar Rp.136.241.121.128,- Surplus/Deficit-LO sebesar Rp.(29.913.491.546) Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas Rp.0 Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.76.333.935.332- dan terdapat Kenaikan/Penurunan Ekuitas sebesar Rp.46.420.443.786,- sehingga Ekuitas Akhir per tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp.182.661.564.914,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan akuntansi berbasis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Sedangkan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan akuntansi berbasis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA EWER
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-23		% thd Anng	31-Dec-22
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1.				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	234.252.000	425.638.655	182	403.694.280
Jum Pendpt Negara & Hibah		234.252.000	425.638.655	182	403.694.280
B. Belanja Negara	B.2.				
1. Belanja Pegawai	B.2.1.	3.070.860.000	3.070.597.396	100	2.891.266.129
2. Belanja Barang	B.2.2.	4.475.822.000	4.460.466.350	100	10.348.668.320
3. Belanja Modal	B.2.3.	69.264.622.000	69.228.510.241	100	349.550.000
4. Belanja Sosial	B.2.4.	-	-	0	-
Jumlah Belanja Negara		76.811.304.000	76.759.573.987	100	13.589.484.449

II. NERACA

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA EWER
NERACA
PER 31 Desember 2023 DAN TAHUN 2022

(dalam Rp)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember Tahun 2023	Tahun 2022
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	Rp 0	Rp 0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	Rp 0	Rp 0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	Rp 0	Rp 0
Jumlah Kas dan Bank		Rp 0	Rp 0
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	Rp 0	Rp 0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.5	Rp 0	Rp 0
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.6	Rp 0	Rp 0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar TPA	C.1.7	Rp 0	Rp 0
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	C.1.8	Rp 0	Rp 0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TGR	C.1.9	Rp 0	Rp 0
Jumlah Piutang (Bersih)		Rp 0	Rp 0
Belanja Dibayar Dimuka	C.1.10	Rp 0	Rp -
Persediaan	C.1.11	Rp 10.265.890	Rp 10.671.415
Jumlah Aset Lancar		Rp 10.265.890	Rp 10.671.415
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2.1	Rp 140.032.000	Rp 140.032.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	Rp 26.034.769.500	Rp 24.441.319.500
Gedung dan Bangunan	C.2.3	Rp 30.620.679.605	Rp 30.620.679.605
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.4	Rp 259.225.797.115	Rp 191.590.736.874
KDP	C.2.5	Rp 0	Rp 0
Akumulasi Penyusutan	C.2.6	Rp (133.369.979.196)	Rp (110.562.318.266)
Jumlah Aset Tetap		Rp 182.651.299.024	Rp 136.230.449.713
Piutang Jangka Panjang	C.3		
TPA	C.3.1	Rp 0	Rp 0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPA	C.3.2	Rp 0	Rp 0
TP/TGR	C.3.3	Rp 0	Rp 0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	C.3.4	Rp 0	Rp 0
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)		Rp 0	Rp 0
Aset Lainnya	C.4		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	Rp 0	Rp 0
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.4.2	Rp 4.282.803.019	Rp 0
Jumlah Aset Lainnya		Rp 4.282.803.019	Rp 0
JUMLAH ASET		Rp 186.944.367.933	Rp 136.241.121.128
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5.1	Rp 4.282.803.019	Rp 0
Uang Muka dari KPPN	C.5.2	Rp 0	Rp 0
Pendapatan yang Ditangguhkan	C.5.3	Rp 0	Rp 0
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.4	Rp 0	Rp 0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		Rp 4.282.803.019	Rp 0
JUMLAH KEWAJIBAN		Rp 4.282.803.019	Rp 0
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar	C.6		
Cadangan Piutang	C.6.1	Rp 0	Rp 0
Cadangan Persediaan	C.6.2	Rp 0	Rp 0
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	C.6.3	Rp 0	Rp 0
Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima	C.6.4	Rp 0	Rp 0
Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	C.6.5	Rp 0	Rp 0
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		Rp 0	Rp 0
Ekuitas Dana Investasi	C.7		
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.7.1	Rp 0	Rp 0
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.7.2	Rp 0	Rp 0
EKUITAS		Rp 182.661.564.914	Rp 136.241.121.128
JUMLAH EKUITAS		Rp 182.661.564.914	Rp 136.241.121.128
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		Rp 186.944.367.933	Rp 136.241.121.128

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA EWER
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022

Uraian	31 Desember 2023	31-Dec-22	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PNBP Lainnya	420.738.655	403.693.991	17.044.664	4,222
Pendapatan BLU	-	-	-	-
Pendapatan Hibah	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Operasional	420.738.655	403.693.991	17.044.664	4,222
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	3.070.597.396	2.891.266.129	179.331.267	6,203
Beban Persediaan	578.405.525	272.219.785	306.185.740	112,477
Beban Barang dan Jasa	1.173.341.500	2.455.600.000	(1.282.258.500)	-52,218
Beban Pemeliharaan	2.370.600.000	7.343.327.920	(4.972.727.920)	-67,718
Beban Perjalanan Dinas	338.524.850	282.165.400	56.359.450	19,974
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-	-
Beban Bunga	-	-	-	-
Beban Subsidi	-	-	-	-
Beban Hibah	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	22.807.660.930	21.696.833.871	1.110.827.059	5,120
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-	-
Beban Transfer	-	-	-	-
Beban Lain-lain	-	-	-	-
Jumlah Beban Operasional	30.339.130.201	34.941.413.105	(4.602.282.904)	-13,171
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(29.918.391.546)	(34.537.719.114)	4.619.327.568	-13,375
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	4.900.000	(1.620.165.210)	1.625.065.210	-100,302
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	4.900.000	-	4.900.000	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	1.620.165.210	(1.620.165.210)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	289	(289)	100
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	289	(289)	100
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	4.900.000	(1.620.164.921)	1.625.064.921	-100,302
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(29.913.491.546)	(36.157.884.035)	6.244.392.489	-17,27
POS LUAR BIASA	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	-	-	-	-
POS LUAR BIASA	-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT – LO	(29.913.491.546)	(36.157.884.035)	6.244.392.489	-17,27

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA EWER
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 Desember 2023 DAN 2022

(dalam Rp)

URAIAN	31 Desember 2023	31-Dec-22	Kenaikan/ Penurunan	(%)
EKUITAS AWAL	136.241.121.128	159.213.214.994	(22.972.093.866)	-
SURPLUS/DEFISIT – LO	(29.913.491.546)	(36.157.884.035)	6.244.392.489	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI	-	-	-	-
EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI	-	-	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN				-
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR				-
Penyesuaain Nilai Aset	-	-	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	-	-	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	-	-	-	-
Selisih Revaluasi Aset	-	-	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	-	-	-	-
LAIN-LAIN	-	-		-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	76.333.935.332	13.185.790.169	63.148.145.163	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	46.420.443.786	(22.972.093.866)	69.392.537.652	-
EKUITAS AKHIR	182.661.564.914	136.241.121.128	46.420.443.786	-

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA EWER

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan PMK 2005/PMK.011/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer berkomitmen dengan visi “ *mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui pembinaan akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.*”

Untuk mewujudkan visi tersebut Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pembinaan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian negara/Lembaga
- Membina secara efektif Kementerian negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplentasikan.

- Mengembangkan sistem pembinaan yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4 Basis Akuntansi

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan periode 31 Desember Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi

merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagian Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Kebijakan
Akuntansi atas
Pendapatan

(1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan -LO adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan Periode waktu.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Kebijakan
Akuntansi atas
Belanja

(3) Kebijakan Akuntansi atas Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Kebijakan Akuntansi atas Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Belanja diakui pada saat timbulnya kewajiban/terjadinya konsumsi aset/terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

Kebijakan
Akuntansi atas
Aset

(5) Kebijakan Akuntansi atas Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum

kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kebijakan
Akuntansi atas
Kewajiban

(6) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Kebijakan
Akuntansi atas
Ekuitas Dana

(7) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Kebijakan
Akuntansi atas
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih

(8) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan Negara
dan Hibah
Rp.425.638,655

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.425.638.655,- atau mencapai 182 persen dari Estimasi Pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.234.252.000,- Pendapatan Negara dan Hibah Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer terdiri dari Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan, Pemanfaatan BMN dan Pendapatan Jasa Kebandarudaraan. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat dalam Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1. Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	-	18.728.080	
2. Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	234.252.000	402.010.575	172
3. Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan		4.900.000	-
Jumlah	234.252.000	425.638.655	182

Berdasarkan Tabel 5 Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2022.

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	31 Desember 2023	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
1. Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	18.728.080	7.963.656	42,52
2. Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	402.010.575	395.730.624	98,44
3. Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.900.000	-	0,00
Jumlah Pendapatan	425.638.655	403.694.280	94,84

B.2. Belanja Negara

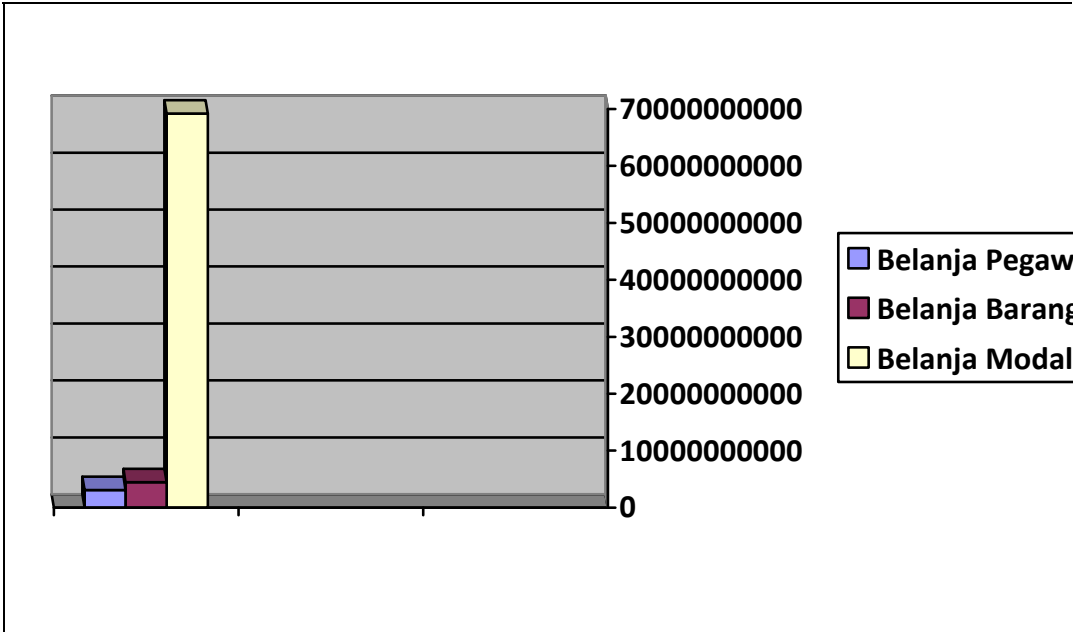
Realisasi Belanja
Negara
Rp.76.759,573,987,-

Realisasi belanja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.76.759.573.987,- atau 100 persen dari anggaran Rp.76.811.304.000,- Rincian Anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2023 tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Negara Per 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	3.070.860.000	3.070.597.396	100
Belanja Barang	4.475.822.000	4.460.466.350	100
Belanja Modal	69.264.622.000	69.228.510.241	100
Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah Belanja	76.811.304.000	76.759.573.987	100

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Berdasarkan Tabel 8 menunjukan bahwa realisasi belanja Per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi belanja per 31 Desember 2022.

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3.070.597.396	2.891.266.129	94,16
Belanja Barang	4.460.466.350	10.348.668.320	232,01
Belanja Modal	69.228.510.241	349.550.000	0,505
Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah Belanja	76.759.573.987	13.589.484.449	17,70

Belanja Pegawai
Rp.3.070.597.396

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer per 31 Desember 2023 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS, Belanja Uang Makan, Tunjangan Kinerja Pegawai dan Belanja Lembur.

Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.3.070.597.396,- atau 100 persen dari Anggaran Rp.3.070.860.000,- Berdasarkan Tabel 9, realisasi belanja pegawai Per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan dari realisasi belanja pegawai 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan adanya penambahan 9 orang CPNS, adanya pegawai yang kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala.

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.366.435.686	1.295.544.871	5,47
Belanja Uang Makan Pegawai	240.413.000	204.816.000	17,38
Belanja Tunj.Khusus Kegiatan	1.436.210.350	1.335.905.258	7,51
Belanja Lembur	27.539.000	55.000.000	(49,93)
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	3.070.598.036	2.891.266.129	6,20
Pengembalian Belanja Pegawai	640	-	-
Jumlah Belanja Bersih	3.070.597.396	2.891.266.129	6,20

Belanja Barang
Rp.4.460.466.350,-

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2023 sebesar Rp.4.460.466.350,- atau 100 persen dari Anggaran Rp.4.475.822.000,- Berdasarkan Tabel 10, Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022, Hal ini disebabkan antara lain adanya kenaikan anggaran belanja barang non operasional dan belanja pemeliharaan.

Tabel 10
Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.014.361.000	1.260.375.000	124
Belanja Barang Non Operasional	190.450.000	1.462.800.000	768,08
Belanja Jasa	66.530.500	-	-
Belanja Pemeliharaan	2.850.600.000	7.343.327.920	(61,18)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	338.524.850	282.165.400	19,97
Jumlah Belanja Kotor	4.460.466.350	10.348.668.320	(56,90)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja Bersih	4.460.466.350	10.348.668.320	(56,90)

Belanja Modal
Rp.69.228.510.241,-

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.69.228.510.241,- atau 100 persen dari anggaran Rp.69.264.622.000,-

Berdasarkan Tabel 11, Realisasi

Belanja Modal Per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan dibandingkan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2022 hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 terdapat belanja modal yang bersumber dana SBSN dan sumber dana RM.

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.890.000	349.550.000	701
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	69.214.620.241	0	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	69.264.510.241	349.550.000	0,50
Pengembalian Belanja Modal	36.000.000	-	-
Jumlah Belanja Bersih	69.228.510.241	349.550.000	0,50

Belanja Bantuan Sosial
Rp.NIHIL

B.2.4. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.NIHIL.

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Aset Lancar
Rp.10.265.890,-

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar Per 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.10.265.890,- dan Rp.10.671.415,-

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udar Ewer per 31 Desember Tahun 2023 disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12
Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2023 dan TA 2022

No.	Aset Lancar	31 Desember 2023	TA 2022
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp -	Rp -
2	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp -	Rp -
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	Rp -	Rp -
4	Belanja Dibayar di Muka	Rp -	Rp -
5	Piutang Bukan Pajak	Rp -	Rp -
6	Bag Lancar Tagihan TP/TGR	Rp -	Rp -
7	Persediaan	Rp 10.265.890	Rp 10.671.415
	Jumlah	Rp 10.265.890	Rp 10.671.415

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp.Nihil

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp.NIHIL yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam Tabel 13.

Tabel 13
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Jenis	31 Desember 2023	TA 2022
1	Bank Mandiri	-	0
2	Uang Tunai	-	0
	Jumlah	-	0

Kas di Bendahara Penerima
Rp.NIHIL

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp.NIHIL.

Persediaan

Rp.10.265.890,-

C.1.9 Persediaan

Nilai Persediaan Per 31 sember 2023 dan TA 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.10.265.890,- dan Rp.10.671.415,-

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2023 dan TA 2022 tersaji pada Tabel 14.

Tabel 14
Rincian Persediaan

No	Persediaan	30-Dec-23	TA 2022
1	Barang Konsumsi	10.265.890	10.671.415
2	Barang untuk Pemeliharaan	-	-
3	Suku Cadang	-	-
5	Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah		10.265.890	10.671.415

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap

Rp.182.651.299.024,-

C.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2023 dan TA 2022 tersaji sebesar masing – masing Rp.182.651.299.024,- dan Rp.136.230.449.713,- Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer Per 31 Desember 2023 dan TA 2022 disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15
Rincian Aset Tetap

No	Jenis	31 Desember 2023	TA 2022
1	Tanah	140.032.000	140.032.000
2	Peralatan dan Mesin	26.034.769.500	24.441.319.500
3	Gedung dan Bangunan	30.620.679.605	30.620.679.605
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	259.225.797.115	191.590.736.874
5	Aset Tetap Lainnya	-	-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
Jumlah		316.021.278.220	246.792.767.979
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(133.369.979.196)	(110.562.318.266)
Nilai Buku Aset Tetap		182.651.299.024	136.230.449.713

Tanah Rp.140.032.000

C.2.1. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer Per 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp.140.032.000,- dan Rp.140.032.000,- Aset Tanah terdiri dari yang bersertifikat senilai Rp.37.546.125,- Aset berupa Tanah tersebut terletak di Jl. Bismam Ewer Kabupaten Asmat.

Rincian saldo tanah bersertifikat Per 31 Desember 2023 disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16
Rincian Saldo Tanah Bersertifikat

No	KIB	Luas	Nilai
1	2010102009	1600 m2	11.800.000
2	2010102003	1826 m2	13.466.750
3	2010101002	1665 m2	12.279.375
Jumlah			37.546.125

Tanah seluas 5.091 m2 yang terletak di Jl.Bismam Ewer Kabupaten Asmat

Peralatan dan Mesin Rp
26.034.769.500,-

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah Rp.26.034.769.500,- dan Rp.24.441.319.500,-

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	24.441.319.500
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	1.593.450.000
Hibah	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:		
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Reklasifikasi BMN-BPYBDS	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	26.034.769.500
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	Rp	(16.414.655.957)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	Rp	9.620.113.543

Rincian Aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Rp.30.620.679.605

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan Per 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah Rp.30.620.679.605,- dan Rp.30.620.679.605,- Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	30.620.679.605
Mutasi tambah:	
Renovasi dan pembangunan pos	-
Koreksi pencatatan nilai Reval	-
Koreksi pencatatan nilai penambahan daya listrik	-
Pembangunan	-
Mutasi kurang:	-
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan	-
Saldo per 31 Desember 2023	30.620.679.605
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(3.651.044.724)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	26.969.634.881

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Jalan,Irigasi dan Jaringan
Rp.259.225.797.115

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.259.225.797.115,- dan Rp.191.590.736.874,- Saldo tersebut terdiri dari pembangunan jalan dan jembatan.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	191.590.736.874
Mutasi tambah:	
Pengembangan Informasi Teknologi	-
Pembangunan, JJ dan Pengawasan	67.635.060.241
Mutasi kurang:	
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	-
Saldo per 31 Desember 2023	259.225.797.115
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(113.304.278.515)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	145.921.518.600

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Konstruksi dalam
Pengerjaan Rp.0

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
(Rp.133.369.979.196)

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing: Rp.(133.369.979.196) dan Rp.(110.562.318.266) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontrak akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). .

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 disajikan pada Tabel 17, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Tabel 17
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	Rp 140.032.000	Rp -	Rp 140.032.000
2	Peralatan dan Mesin	Rp 26.034.769.500	Rp (16.414.655.957)	Rp 9.620.113.543
3	Gedung dan Bangunan	Rp 30.620.679.605	Rp (3.651.044.724)	Rp 26.969.634.881
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 259.225.797.115	Rp (113.304.278.515)	Rp 145.921.518.600
5	KDP	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah		Rp 316.021.278.220	Rp (133.369.979.196)	Rp 182.651.299.024

-

Kewajiban Jangka

Kewajiban Jangka Pendek

Rp. 4.282.803.019

KEWAJIBAN

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2023 dan TA 2022 tersaji sebesar Rp.4.282.803.019 dan Rp.NIHIL

Kewajiban Jangka Pendek merupakan Utang kepada Pihak Ketiga PT. Waskita Jaya Purnama pekerjaan pembuatan drainase dan tanggul penahan banjir (SPP RPATA yang masih belum menjadi SPM atau bisa disebut sebagai transaksi yang belum terbit SP2D).

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer per 31 Desember 2023 disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No.	Aset Lancar	Jumlah
1	Utang kepada Pihak Ketiga	Rp 4.282.803.019
2	Uang Muka dari KPPN	Rp -
3	Pendapatan yang Ditangguhkan	Rp -
4	Pendapatan Diterima di Muka	Rp -
	Jumlah	Rp 4.282.803.019

Utang kepada Pihak Ketiga

Rp.4.282.803.019

C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2023 dan TA 2022 masing-masing sebesar Rp.4.282.803.019 dan Rp.NIHIL

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer per tanggal pelaporan disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Rp -	o
2	Belanja barang yang masih harus dibayar	Rp -	o
3	Utang kepada Pihak ketiga	Rp 4.282.803.019	SPP RPATA yang masih belum menjadi SPM atau bisa disebut sebagai transaksi yang belum terbit SP2D).
Total		Rp 4.282.803.019	

Uang Muka dari KPPN
Rp.NIHIL

C.5.2 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN Per 31 Desember 2023 dan TA 2022 masing-masing sebesar Rp.NIHIL dan Rp.NIHIL

Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Pendapatan Yang
Ditangguhkan Rp.NIHIL

C.5.3 Pendapatan yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan yang Ditangguhkan Per 31 Desember 2023 dan TA 2022 masing-masing sebesar Rp.NIHIL dan Rp.NIHIL

Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan Pendapatan Negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan.

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Ewer per tanggal pelaporan disajikan pada Tabel 20.

Tabel 20.
Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan PNB	Rp -
2	PPH yang belum disetor	Rp -
3	PPN yang belum disetor	Rp -
Total		Rp -

Pendapatan Diterima
Dimuka Rp .NIHIL

C.5.4 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan TA 2022 sebesar Rp.NIHIL dan Rp.NIHIL

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan pada

Tabel 21.

Tabel 21 .
Rincian Pendapatan Diterima di Muka

No	Uraian	31 Desember 2023
1	-	Rp -
2	-	Rp -
3	-	Rp -
Total		Rp -

Ekuitas
Rp.182.661.564.914,-

EKUITAS

C.6 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas Per 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.182.661.564.914,- dan Rp. 136.241.121.128,- Rincian Ekuitas disajikan pada Tabel 22.

Tabel 22 .
Ekuitas

No	Uraian	31 Desember 2023	Penjelasan
1	Ekuitas	Rp 182.661.564.914	-
2	-	Rp -	
3	-	Rp -	
Total		Rp 182.661.564.914	

Pendapatan PNB
Rp.420.738.665,-

D. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak-LO

Pendapatan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP)-LO pada Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.420.738.665,- dan Rp.403.693.991,-

Pendapatan PNBP-LO merupakan hak pemerintah atas pendapatan PNB karena adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, tanpa harus memperhatikan adanya aliran kas masuk ke rekening kas negara.

Rincian pendapatan PNB-LO disajikan pada Tabel 23.

Tabel 23
Rincian Pendapatan PNB-LO Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desemeber 2022	Naik (Turun) %
1. Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	18.728.080	7.963.656	50.00
2, Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	402.010.575	395.730.335	78.08
3, Pendapatan dari penjualan	-	-	-
Jumlah	420.738.655	403.693.991	73.14

Pendapatan jasa merupakan pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan dan pendapatan jasa bandar udara.

Beban Pegawai
Rp.3.070.597.396,-

D.2. Beban Pegawai

Beban pegawai Per 31 desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.3.070.597.396,- dan Rp.2.891.266.129,-

Beban pegawai adalah beban atas kewajiban kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, PNS, dan pegawai yang dipekerjakan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan denan pembentukan modal.

Rincian beban pegawai disajikan pada Tabel 24.

Tabel 24
Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

3+A1:D8o Juni 2021	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Gaji	1.366.435.046	954.145.880	43,21
Beban Tunjangan	1.436.210.350	1.677.304.249	(14,37)
Beban Honorarium	-	-	-
Beban Uang Makan	240.413.000	204.816.000	17,38
Beban Lembur	27.539.000	55.000.000	(49,93)
Jumlah	3.070.597.396	2.891.266.129	6,20

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp.578.405.525,-

Beban Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp.578.405.525,- dan Rp.272.219.785,- Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian beban persediaan disajikan pada Tabel 25.

Tabel 25
Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	578.405.525	272.219.785	112,48
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang			
Beban Persediaan Lainnya			-
Jumlah	578.405.525	272.219.785	112,48

Beban Barang dan Jasa
Rp.1.173.341.500,-

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp.1.173.341.500,- dan Rp.2.455.600.000,-

Beban jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian beban jasa disajikan dalam Tabel 26.

Tabel 26
Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	593.400.000	405.250.000	68,29
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	10.875.000	7.200.000	66,2
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	238.320.000	178.920.000	75,1
Beban Barang Operasional Lainnya	73.766.000	331.430.000	449,30
Beban Bahan	50.450.000	20.000.000	39,6
Beban Barang Non Operasional Lainnya	140.000.000	1.312.800.000	937,71
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	16.630.500	150.000.000	902,0
Beban Jasa Konsultan	49.900.000	50.000.000	-
Jumlah	1.173.341.500	2.455.600.000	(52,22)

Beban Pemeliharaan
Rp.2.370.600.000,-

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.2.370.600.000,- dan Rp.7.343.327.920,-

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan asset tetap atau asset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan disajikan dalam Tabel 27.

Tabel 27
Rincian Beban Pemeliharaan

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan	369.200.000	6.667.531.920	(94,46)
Beban Pemeliharaan Peralatan & Mesin	182.770.000	143.296.000	27,55
Beban Pemeliharaan peralatan & Mesin Lainnya	124.900.000	-	-
Beban Pemeliharaan Jaringan	1.693.730.000	532.500.000	218,07
Beban persediaan bahan untuk	-	-	-
Beban Pemeliharaan Irigasi			
Jumlah	2.370.600.000	7.343.327.920	(67,72)

Beban Perjalanan Dinas
Rp.338.524.850,-

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.338.524.850,- dan Rp.282.165.400,-

Beban perjalanan dinas tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian beban perjalanan dinas disajikan dalam Tabel 28.

Tabel 28
Rincian Beban Perjalanan Dinas

Uraian	31 Desmber 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	338.524.850	282.165.400	19,97
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
Jumlah	338.524.850	282.165.400	19,97

Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat Rp.NIHIL

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.NIHIL

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat.

Rincian Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat sebagaimana tersaji pada Tabel 29.

Tabel 29
Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Gedung & Bangunan diserahkan kepada masyarakat/pemda	-	-	-
Beban Peralatan & Mesin diserahkan kepada masyarakat/pemda	-	-	-
Beban Barang Lainnya kepada masyarakat/pemda			
		-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Bantuan Sosial
Rp.NIHIL

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.NIHIL.

Rincian beban bantuan sosial tersaji dalam Tabel 30.

Tabel 30
Rincian Beban Bantuan Sosial

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Bansos untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bansos untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bansos untuk Pemberdayaan Sosial			
		-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp.22.807.660.930,-

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.22.807.660.930,- dan Rp.21.696.833.871,-

Baban penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu asset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat asset tersebut. Sedangkan beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk asset tak berwujud.

Rincian beban penyusutan dan amortisasi tersaji pada Tabel 31.

Tabel 31
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

31 Desember 2021+A1:D9	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan & Mesin	2.072.643.602	2.101.972.407	(1,40)
Beban Penyusutan Gedung & Bangunan	617.069.513	624.474.836	(1,19)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	18.977.118.473	18.970.386.628	0,04
Beban Penyusutan Irigasi	1.140.829.342	-	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Jumlah	22.807.660.930	21.696.833.871	(44,67)

Beban Penyisihan Piutang
Tak Tertagih Rp.NIHIL

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban penyisihan piutang tak tertagih Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.NIHIL.

Beban penyisihan piutang tak tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktagihan piutang dalam satu periode tahun anggaran berjalan.

Rincian beban penyisihan piutang tak tertagih tersaji pada Tabel 32.

Tabel 32
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang JI Pendek	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang JI Panjang	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Lain-lain Rp.NIHIL

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.NIHIL.

Beban lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja.

Rincian beban lain-lain disajikan pada Tabel 33.

Tabel 33
Rincian Beban Lain-lain

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan & Mesin	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung & Bangunan	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus/Defisit dari
Kegiatan Operasional Rp.
(29.918.391.546)

D.12. Kegiatan Operasional

Pos Surplus/deficit dari kegiatan operasional Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.(29.918.391.546) dan Rp.(34.537.719.114),- terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Rincian surplus/deficit dari kegiatan non operasional disajikan pada Tabel 34.

Tabel 34
Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan dari kegiatan operasional	(29.918.391.546)	(34.537.719.114)	(13,375)
Beban dari kegiatan Operasional	-	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	-	-	-
Penjualan Alat kantor	-	-	-
Jumlah Beban	-	-	-
Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	(29.918.391.546)	(34.537.719.114)	(13,375)

Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non Operasional
Rp. 4.900.000

D.13. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/deficit dari kegiatan non operasional Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.4.900.000 dan Rp.(1.620.164.921) terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Rincian surplus/deficit dari kegiatan non operasional disajikan pada Tabel 34.

Tabel 34
Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	1.620.165.210	(100,00)
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	-	289	(100,00)
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	4.900.000	-	-
Penjualan Alat kantor	-	-	-
Defisit selisih kurs	-	-	-
Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional	4.900.000	(1.620.164.921)	(100,302)

Surplus/Defisit Sebelum
Pos Luar Biasa
Rp.(29.913.491.546)

D.14. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Sebelum Pos luar biasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing terdiri dari Rp.(29.913.491.546) dan (36.157.884.035). Rincian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 35.

Tabel 35
Rincian Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	(29.913.491.546)	(36.157.884.035)	(17,27)
	-	-	-
			-
Jumlah	(29.913.491.546)	(36.157.884.035)	(17,27)

Surplus/Defisit -LO
Rp.(29.913.491.546)

D.15. Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing terdiri dari Rp.(29.913.491.546) dan (36.157.884.035). Rincian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 35.

Tabel 35
Rincian Surplus/Defisit -LO

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	(29.913.491.546)	(36.157.884.035)	(17,27)
	-	-	-
			-
Jumlah	(29.913.491.546)	(36.157.884.035)	(17,27)

E. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
Ekuitas Awal Rp.136.241.121.128,-	E.1. Ekuitas Awal Nilai Ekuitas Awal Per 31 Desember 2023 sebesar Rp.136.241.121.128,- dan 31 Desember 2022 Rp.159.213.214.994,-
Surplus/Defisit - LO Rp.(29.913.491.546)	E.2. Surplus (Defisit) – LO Surplus/Defisit-LO untuk periode yang berakhir Per 31 Desember 2023 sebesar Rp.(29.913.491.546,-) dan 31 Desember 2022 Rp. (36.157.884.035) Surplus/Defisit-LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Rp.NIHIL	E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari Dampak Kumulatif perubahan kebijakan Akuntansi/Kesalahan mendasar. Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas Per 31 Desember 2023 sebesar Rp. Nihil dan 31 Desember 2021 Rp. Nihil
Penyesuaian Nilai Aset Rp.NIHIL	E.4. Penyesuaian Nilai Aset Penyesuaian Nilai Aset Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. Nihil.
Koreksi Atas Reklasifikasi Rp. NIHIL	E.5. Koreksi Atas Reklasifikasi Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan reklasifikasi pada laporan keuangan. Koreksi atas Reklasifikasi Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. Nihil.
Koreksi atas Beban Rp.NIHIL	E.6. Koreksi atas Beban Koreksi atas beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas beban Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.Nihil. Rincian koreksi atas beban disajikan dalam Tabel 37.

Tabel 37
Koreksi atas Beban

No	Jenis	31 Desember 2023	31-Dec-22
1	Beban Pegawai	-	-
2	Beban Persediaan	-	-
		-	-
Jumlah		-	-

Koreksi atas pendapatan
Rp.NIHIL

E.7. Koreksi atas Pendapatan

Koreksi atas pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan.

Koreksi atas pendapatan Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp.NIHIL.

Rincian koreksi atas pendapatan disajikan dalam Tabel 38.

Tabel 38
Koreksi atas pendapatan

No	Uraian	31 Desember 2023	31-Dec-22
1	Pendapatan PNPB	-	-
2	Pendapatan Perpajakan	-	-
Jumlah		-	-

Selisih Revaluasi Aset
Rp.NIHIL

E.8. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.NIHIL.

Koreksi Nilai Aset Non
Revaluasi Rp. NIHIL

E.9. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Per 31 Desember 2023 sebesar Rp. NIHIL dan 31 Desember 2022 Rp. NIHIL

Transaksi Antar Entitas
Rp.76.333.935.332,-

E.10. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas Per 31 Desember 2023 sebesar Rp.76.333.935.332,- dan 31 Desember 2022 Rp. 13.185.790.169,-

Kenaikan/Penurunan
Ekuitas Rp.46.420.443.786

E.11. Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Nilai Kenaikan/Penurunan Ekuitas Per 31 Desember 2023 sebesar Rp.(46.420.443.786,-) dan 31 Desember 2022 Rp.(22.972.093.866),-

Ekuitas Akhir
Rp.182.661.564.914,-

E.12. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas akhir Per 31 Desember 2023 sebesar Rp.182.661.564.914,- dan 31 Desember 2022 Rp. 136.241.121.128,-

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Sampai dengan tanggal pelaporan per 31 Desember 2023 Neraca Kantor UPBU Ewer Masih terdapat kewajiban jangka pendek sebesar Rp.4.282.803.019 merupakan Utang kepada Pihak Ketiga PT. Waskita Jaya Purnama pekerjaan pembuatan drainase dan tanggul penahan banjir (SPP RPATA yang masih belum menjadi SPM atau bisa disebut sebagai transaksi yang belum terbit SP2D).

D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting lainnya setelah tanggal neraca.

D.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT BPK

-

D.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

Daftar informasi pendapatan dan belanja akrual disajikan sebagaimana dalam lampiran.

D.4 REKENING PEMERINTAH

Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Kantor UPBU Ewer adalah rekening virtual pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 8100126063431000 a.n. BPG 068 Bandar Udara Ewer.

D.5 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Kementerian Perhubungan terdapat Alokasi Anggaran untuk Piritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

- 5. Prioritas Nasional V – Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Pelaksanaannya diantaranya melalui 1 program prioritas, 1 kegiatan prioritas, di Satuan Kerja dengan pagu awal mencapai Rp.80.000.000.000,- Pagu setelah revisi Rp.69.214.622.000,- dan realisasi sebesar Rp.69.214.620.241,- dengan rincian sebagai berikut.

Nama Satker	Program/Kegiatan Prioritas	Pagu setelah Revisi	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Kantor UPBU Ewer	Program Infrastruktur Konektivitas/ Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	69.214.622.000	69.214.620.241	100	Unit	1.0000	-	100